

**Anna Sardiana, Alaida Najieb**

Indonesia Banking School

[anna.sardiana@ibs.ac.id](mailto:anna.sardiana@ibs.ac.id),

[alaida.20191311017@ibs.ac.id](mailto:alaida.20191311017@ibs.ac.id)

### **Abstrak**

Mengakhiri kemiskinan, menjaga lingkungan, dan mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang adalah bagian dari Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan menyeimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan, dan untuk pertama kalinya menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dalam agenda yang sama (PBB, 2018). Dan karena zakat terutama ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin keadilan sosial, maka zakat dapat menjadi sumber uang pendukung. Zakat adalah cara melayani Allah SWT sebagai hamba dan cara bagi umat Islam untuk mendistribusikan kembali pendapatan mereka kepada sesama manusia. Akibatnya, perspektif ini memandang hubungan antara zakat dan SDGs sebagai sarana dakwah Islam untuk berkontribusi pada dunia. Tujuan zakat dalam Islam berkaitan dengan tujuan syariah, juga dikenal sebagai maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang apakah peran zakat dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan data kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti studi literatur dari penelitian sebelumnya dan mengutip isi website lembaga zakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Sustainable Development Goals (SDGs), Zakat, Kemiskinan

### **Abstract**

Ending poverty, safeguarding the environment, and achieving peace and prosperity for all people are all part of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. By balancing economic, social, and environmental factors via sustainable development, and for the first time putting poverty alleviation and sustainable development on the same agenda (UN, 2018). And because zakat is primarily aimed at relieving poverty and guaranteeing social justice, it can be a source of support monies. Zakat is both a way of serving Allah SWT as a servant and a way for

Muslims to redistribute their income to their fellow humans. As a result, this perspective views the relationship between zakat and the SDGs as a means of Islamic da'wah to contribute to the world. The purposes of zakat in Islam pertain to the goals of sharia, also known as maqashid sharia. As a result, the researcher intends to conduct research on whether the role of zakat can affect sustainable development in Indonesia using qualitative data and data collection techniques such as literature studies from previous studies and citing the contents of the Indonesian zakat institution's website.

**Keyword:** Sustainable Development Goals (SDGs), Zakat, Poverty

## **1. Latar Belakang**

Agenda untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, mengacu pada mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Menyeimbangkan ekonomi, sosial dan ekologi melalui pembangunan berkelanjutan, dan menempatkan perjuangan melawan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan pada program yang sama untuk pertama kalinya (PBB, 2018).

Jelas bahwa sembilan prioritas publik Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) sejalan dengan SDGs. Selain itu, setelah memetakan pretensi dan target rencana publik dengan SDGs, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) mengusulkan agar 108 dari 169 target SDG disesuaikan dengan RPJMN ( Brodjonegoro , 2018). Pada 25 September 2015 oleh 193-Member United Nations General Assembly (UNGA). Sasarannya berjumlah tujuh belas , dengan 169 sasaran. Tujuannya adalah:

1. Hentikan semua kemiskinan di mana-mana.
2. Hentikan kelaparan, raih pangan sehat dan bergizi serta perkenalkan pertanian berkelanjutan.
3. Memberikan kesejahteraan bagi segala usia untuk hidup sehat dan sejahtera.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mendorong terbukanya literasi sepanjang hayat untuk semua.
5. Memberikan keadilan bagi semua kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala usia.
6. Terjaminnya ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang baik untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Dengan mewujudkan energi yang terjangkau, canggih, berkelanjutan dan modern.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inklusi, dan dapat mendorong inovasi yang baik untuk pembangunan berkelanjutan.
10. Untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam negeri dan lintas negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia lebih inklusif, aman, tangguh, dan tahan lama.
12. Ini akan memastikan bahwa pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan konsekuensinya.
14. Pembangunan berkelanjutan memerlukan pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Mempertahankan, meningkatkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, pengelolaan hutan, dan pencegahan penggurunan.
16. Membina masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan jangka panjang dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap keadilan dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Mengintensifkan metode untuk membentuk dan memperbarui hubungan di seluruh dunia untuk mencapai pembangunan jangka panjang.

Ada keterbatasan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan dan pengentasan kemiskinan, yang sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah, bantuan pembangunan resmi, dan pendapatan pinjaman dari organisasi keuangan multilateral. Namun, untuk mencapai SDGs, ini tidak lagi cukup. Menurut Forum Ekonomi Dunia (2015), kesenjangan investasi saat ini di sektor-sektor vital adalah \$3,1 triliun (yaitu, perbedaan antara total investasi yang dibutuhkan dan dana pembangunan tradisional yang tersedia). Akibatnya, sumber keuangan harus lebih banyak ditemukan melalui kerjasama dengan sektor komersial, agama, dan lain- lain.

Karena zakat terutama dirancang untuk membantu pengentasan kemiskinan dan memajukan keadilan sosial, zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana bantuan. Dalam Islam, kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh realisasi pendapatan dan distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan non-materi, serta pembangunan ekonomi jangka panjang ( Chapra , 2008). Zakat sebagai lembaga adalah zakat wajib di mana sebagian dari kekayaan orang kaya, serta semua jenis properti yang berhak zakat dari seorang Muslim, dibayarkan setiap tahun untuk kepentingan komunitas Muslim yang miskin.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, zakat dapat berperan dalam upaya penanganan di Indonesia. Berdasarkan outlook data zakat tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ), total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 327,6 triliun. Uang zakatnya Rp. 58,78 triliun, zakat pendapatan dan jasa sebesar Rp. 139,7 triliun, dan zakat perusahaan sebesar Rp. 144,5 triliun (Outlook Zakat Indonesia 2021). Berdasarkan penelitian Baznas , dari potensi zakat yang mencapai Rp. 327,6 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp. 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah tersebut, Rp. 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat resmi (OPZ), yaitu Baznas , dan hanya Rp.

10,2 triliun yang masuk melalui OPZ resmi. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) mengimbau kepada lembaga penghimpun zakat untuk berperan aktif dalam memobilisasi masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat ( muzakki ) untuk membayar zakat.

Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus sebagai mekanisme redistribusi kekayaan umat Islam kepada sesama manusia. Oleh karena itu, cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam untuk berkontribusi kepada dunia. Dalam Islam, tujuan zakat mengacu pada tujuan syariah atau yang disebut dengan maqashid syariah. Di sisi lain, SDGs mengandung tujuan pembangunan. Maka untuk menempatkan peran zakat secara merata, yang perlu dibandingkan adalah melihat relevansi dan prioritas masing-masing tujuan yaitu maqashid syariah di satu sisi dan SDGs di sisi lain (Utama, 2021). Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian apakah peran zakat dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **2. Tinjauan Literatur**

### **2.1 Implementasi dan Peran SDGs di Indonesia**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diluncurkan pada pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 2012. Gagasan dasar SDGs adalah serangkaian tujuan jangka pendek untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan menjaga lingkungan. Ada 17 tujuan bersama dan 169 target dalam SDGs (UNDP; Panuluh & Fitri, 2015; Imaz & Sheinbaum, 2017). Laporan di SDG Index and Dashboard berisi informasi terbaru tentang implementasi SDG di seluruh dunia ( Hudaefi, 2020). Indonesia ditempatkan 101 dari 166 negara dalam peringkat SDG keseluruhan, menurut laporan 2020.

Indonesia dianggap berada pada kecepatan untuk mencapai SDGs dalam hal mengakhiri kemiskinan (SDG 1), air bersih dan sanitasi yang layak (SDG 6), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang kuat (SDG 8) dan aksi iklim, menurut tinjauan kemajuan (SDGs). 13). Tren Indonesia digambarkan sebagai 'peningkatan moderat ' di bidang kelaparan (SDG 2), kesehatan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi semua orang (SDG 3), ketersediaan pendidikan yang berkualitas (SDG 4), energi yang terjangkau dan bersih (SDG 7), inovasi dan infrastruktur industri yang baik (SDG 9) dan terciptanya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (SDG 16). Kesetaraan gender (SDG 5), kota dan masyarakat yang berkelanjutan (SDG 11), kehidupan bawah laut yang baik melalui konservasi (SDG 14), dan kehidupan di darat (SDG 15) termasuk di antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 15).



Sumber: Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, & Fuller, 2020

**Gambar 1.**  
**Tren SDGs di Indonesia Tahun 2020**

Menurut data BPS (2021), angka kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Angka kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 1,12 juta orang, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, persentase penduduk kurang mampu turun 0,01 persen pada September 2020. Pada Maret 2021, kemiskinan perkotaan meningkat menjadi 0,01 persen dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen berdasarkan wilayah pemukiman. Sebaliknya, tingkat kemiskinan pedesaan turun 0,10 persen, dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen. Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan telah berkurang, namun angka kemiskinan di pedesaan tetap lebih besar dibandingkan di perkotaan (Puskas Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional) (Puskas Baznas, 2021). Namun, selain masalah kemiskinan negara, ada banyak penelitian yang mengajukan berbagai jawaban atas masalah kemiskinan negara, yang termasuk dalam solusi pengentasan kemiskinan, khususnya melalui zakat (Irawan 2020, 105). Zakat merupakan bukti kuat dalam sejarah kejayaan Islam, dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Bahwa Zakat merupakan cara yang tepat dan efektif untuk pembagian keuntungan, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial bagi yang membutuhkan.

## **2.2 Zakat dalam Kesejahteraan Ekonomi Melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 001/MUNAS/- IX/ MUI/2015, yang mengakui penggunaan uang zakat dalam mendukung proyek SDG 6, publikasi ilmiah baru-baru ini telah mengeksplorasi konsep zakat dan SDGs di Indonesia. umum. Pemerintah daerah telah menggunakan zakat untuk mempromosikan pembangunan manusia dan kemakmuran ekonomi, menurut laporan ini. Mereka mengatakan bahwa zakat memiliki dampak yang menguntungkan pada pembangunan manusia di Malaysia, menyiratkan bahwa SDGs dapat dilaksanakan secara lokal (Suprayitnoetal., 2017). Noor dan Pickup telah mengeksplorasi kesamaan mendasar antara zakat dan SDGs (2017). SDGs zero kemiskinan, nol kelaparan, dan

pengurangan ketimpangan, menurut Noor & Pickup (2017), benar-benar sejalan dengan prinsip zakat. Selain itu, Ismail dan Sheikh (2017) menggarisbawahi pentingnya zakat dalam pencapaian SDGs. Mereka kemudian mengklaim bahwa zakat memiliki kemampuan untuk membantu mencapai SDGs berikut:

- Akhiri kemiskinan dan kelaparan,
- Mendukung kesehatan dan kemakmuran global untuk semua orang,
- Meningkatkan kualitas pendidikan,
- Pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan
- Mengurangi disparitas pendapatan (Ismail & Sheikh, 2017).

Asmalia dkk. (2018) dan Harahap dkk. (2018) keduanya menjawab kemungkinan dana zakat untuk membiayai proyek terkait SDG (2018). Masing-masing telah melakukan penelitian tentang prospek pendanaan zakat SDGs dan kewirausahaan. Penelitian mereka membuat mereka percaya bahwa pembayaran ini dapat membantu pelaksanaan SDGs dengan mengubah Mustahiq (sebagian besar penerima zakat miskin) menjadi Muzakki (mereka yang secara khusus membayar zakat). Lebih lanjut, Anindita & Sidiq (2018) menemukan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs di 34 provinsi di Indonesia. Keberadaan amil zakat merupakan langkah optimalisasi fungsi zakat agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk menjamin profesionalisme, idealnya amil adalah lembaga formal di bawah pemerintahan yang mampu mengoptimalkan penghimpunan dan pengalokasian dana zakat secara efisien dan efektif (Hafidhuddin, 2011). "Zakat itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, pemungut zakat, yang telah melunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan) hamba-hambaku, untuk (membebaskan) orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang berutang. berutang. -berutang. dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Surat At- Taubah [9]: 60)

Sebelumnya telah ada penelitian-penelitian yang menjadi bentuk diskusi terkini tentang persoalan zakat dan SDGs, khususnya dalam kaitannya dengan penerapannya di Indonesia. Beberapa orang memungkinkan untuk mengakui bahwa studi penelitian ini sebagian besar merupakan penjelasan teoretis tentang zakat dan SDGs, dengan sedikit wawasan praktis yang diperoleh dari pengalaman lembaga zakat dalam mendukung SDGs tertentu. Dalam Islam, kebahagiaan manusia terkonsentrasi tidak hanya pada pencapaian pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan spiritual, material, dan non material (Asmalia, 2018). Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang memenuhi unsur-unsur maqashid syariah. Begitu juga dengan maraknya praktik kontemporer dalam penyaluran dana zakat terkait isu SDG seperti proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jambi. Dana Zakat telah mendukung pembangunan PLTMH untuk menyediakan listrik bagi 806 rumah tangga di

empat desa di Provinsi Jambi, yaitu Lubuk Desa Bangkar (60 kW), Ngaol (40 kW), Air Liki (40 kW), dan Air Liki Baru (40 kW). Sehingga menguntungkan 8 ribu orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tulisan ini mencoba mengkaji perspektif masyarakat miskin penerima bantuan BAZNAS. Kajian terkait manfaat zakat dalam keuangan pembangunan berkelanjutan ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman sejauh mana penerima zakat telah merasakan manfaat dari penyaluran zakat.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Ringkasan Pendekatan dan Tujuan Peneliti**

No	Topik	Penulis/ Tahun Publikasi / Link Paper	Variabel / Kontribusi	Metodologi/Alat Penelitian	Hasil	Penelitian Selanjutnya (Saran)
1.	Memahami Peran Green Bonds dalam Memajukan Keberlanjutan	Aaron Maltais & Bjorn Nykvist /2020/ <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2020.1724864">https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2020.1724864</a>	Obligasi Hijau dan Memajukan Keberlanjutan	Melakukan 22 wawancara dalam dengan pelaku di pasar obligasi hijau Swedia Selama musim gugur 2017 dan musim semi 2018. Melakukan wawancara 9 penerbit menjalin kedekatan hijau bagus dari sektor publik juga bukan sektor swasta yang memiliki menerbitkan menjalin kedekatan hijau dalam Kronor Swedia. Diwawancarai 3	Investor pada umumnya Temukan itu menjalin kedekatan hijau dampak karena mereka memberi insentif ke penerbit menjalin kedekatan untuk mengalihkan ke lebih banyak model bisnis hijau. Pertumbuhan pasar obligasi hijau juga terlihat sebagai melangkah awal untuk meningkat tuntutan kontinuitas oleh luas di pasar modal. Investor juga menemukan itu menjalin kedekatan hijau adalah alat penting untuk membuat kesadaran di antara pelanggan mereka dan publik tentang koneksi Di antara keberlanjutan dan	Itu karena perusahaan penerbit menjalin kedekatan hijau yang tinggi dalam hal keberlanjutan, seharusnya ada sejumlah laba pengurangan mempertaruhkan dari menginvestasikan di menjalin kedekatan hijau dibandingkan menjalin kedekatan biasa.

				<p>orang Emiten yang diwawancarai juga menerbitkan menjalin kedekatan hijau dalam mata uang lain.</p> <p>Mewawancarai 9 investor Swedia di menjalin kedekatan hijau, termasuk dana pensiun publik, dana pensiun, &amp; investasi swasta dan perusahaan asuransi.</p> <p>Dan juga mewawancarai 2 bank Swedia yang menanggung menjalin kedekatan hijau di pasar obligasi hijau Swedia, satu pertukaran dan satu ahli di penyelidikan terbaru Pemerintah Swedia tentang menjalin kedekatan hijau</p>	<p>keuangan. Lanjut banyak dari penerbit diwawancarai _ memikirkan itu menjalin kedekatan hijau membantu 'membuat kasus' untuk profesi keberlanjutan yang telah diadakan perusahaan, lebih mengkonsolidasikan Profil kontinuitas perusahaan.</p> <p>penerbit melihat menjalin kedekatanhijau sebagai fungsi sinyal penting, sorot itu Investasi lain yang sebanding Tidak ramah lingkungan dan keberadaan permintaan investor untuk investasi hijau.</p> <p>Menjalin kedekatan hijau dirancang untuk Menjadi instrumen keuangan yang akrab dan berisiko rendah yang memungkinkan investor dan emiten untuk berkontribusi pada mandat kontinuitas dengan biaya relative rendah.</p>	
2.	Taksonomi Keuangan Berkelanjutan UE dan Kontribusinya terhadap	Franziska Schütze dan Jan Stede /2021/ <a href="https://www.tandfonli">https://www.tandfonli</a>	<i>Taksonomi UE</i>	Sebanyak 642 pemangku kepentingan minat mengikuti sebaik di konsultasi, kira-kira. setengah adalah individu	Tujuan utama Taksonomi UE adalah untuk memberi informasi lebih lanjut transparan dan standar tentang pertunjukan lingkungan dari perusahaan atau investasi tertentu.	Responden menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan tingkat konsumsi maksimal yang



	<p>Netralitas Iklim</p>	<p>ne.com/doi/ full/10.108 0/2043079 5.2021.200 6129</p>		<p>pribadi. Dari organisasi dan perusahaan publik atau pribadi dalam evaluasi kami, yaitu sebanyak 355 pemangku kepentingan minat itu.</p>	<p>Dengan fokus pada sektor dengan intensitas karbon tinggi, kami menunjukkan itu Taksonomi momen ini meliputi aktivitas ekonomi di sektor yang bertanggung jawab menjawab hingga 80% dari emisi UE, tetapi hanya 20% bidang pekerjaan dan nilai 28% plus kotor. Kertas ini mengenali jumlah pelajaran penting dan menunjukkan area untuk perkembangan lagi lanjutan. Pertama, intensitas kekuasaan kerja bukan indikator intensitas informasi karbon yang bagus terkait taksonomi ke di persyaratan NFRD karenanya akan mengecualikan sejumlah perusahaan padat emisi, sementara pada saat yang sama menambahkan upaya administratif untuk perusahaan dengan emisi rendah. Kedua, Taksonomi momen ini Tidak menunjukkan melacak pergi ke kenetralan iklim untuk sejumlah aktivitas ekonomi yang dicakupnya menunjukkan kenetralan iklim mengatur untuk sejumlah aktivitas ini,</p>	<p>memenuhi istilah Eropa tambahan untuk bangunan baru.</p>
--	-----------------------------	--	--	--	---	---

					<p>seperti mobil penumpang, dimana saja knalpot listrik sepenuhnya kendaraan emisi Memenuhi kondisi dari 2026. Ketiga, dengan mengatur standar pertunjukan berdasarkan sains untuk berbagai sektor ekonomi, taksonomi bisa digunakan untuk membuat mengeklaim kontinuitas perusahaan, seperti target nol bersih, lebih kredibel. Keempat, beberapa tantangan terkait dengan penentuan kriteria kinerja yang memadai bisa dipahami dengan berbagai kemungkinan kasus menggunakan Taksonomi. Di mana Taksonomi? bisa digunakan untuk evaluasi kinerja rata-rata perusahaan momen ini, dan tingkat proyek, di mana Taksonomi bisa digunakan sebagai alat penyaringan untuk investasi baru. Namun, untuk investasi baru, hanya investasi ke di teknologi inovatif yang melampaui status quo yang harus diberikan insentif untuk menampung siklus investasi Titik lama di industri ini.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3.	Keuangan Berkelanjutan di Jepang	Kim Schumacher, Hugues Chenet, & Ulrich Volz/2020/ <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2020.1735219">https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2020.1735219</a>	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) menjadi kriteria di memukau keputusan keuangan; standar lebih banyak pelaporan dan pengungkapan; dan pengembangan menjalin kedekatan pasar investasi yang hijau dan berkelanjutan. Dan Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA) untuk memeriksa paparan subsektor pasar modal Jepang Selama sejumlah	Dengan Melakukan penilaian melalui sistem Paris Agreement Capital Assessment (PACTA) dan menggunakan ESG dalam memukau keputusan.	Ekonomi Jepang dan implikasinya, sektor keuangan Jepang dan institusinya wajah mempertaruhkan iklim yang signifikan _ bagus dari di juga bukan di luar Jepang. Sektor keuangan Jepang memiliki Mulailah mempertimbangkan mempertaruhkan terkait iklim dan harmonisasi diri sendiri dengan tujuan perkembangan skenario pemanasan 2°C yang berkelanjutan dan diuraikandi Kesepakatan iklim Paris. Namun, lebih banyak tindakan asertif dibutuhkan oleh sektor keuangan Jepang untuk mengembangkan keuangan keberlanjutan dan integrasi Kebijakan LST, termasuk melalui penyingkapan mempertaruhkan keuangan terkait iklim yang harmonis dengan TCFD ke atas penting lagi peningkatan pembiayaan jaringan ekonomi nol karbon melalui portofolio, dalam semua kelas asetnya. Jepang wajah bahaya itu standar keuangan berkelanjutan saat ini	Kerangka kerja pendukung, seperti memandu dikembangkan bersama oleh Dewan Standar Pengungkapan Iklim dan Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan, menawarkan instrumen yang tersedia untuk memajukan menggeser pergi ke berbasis ilmu material integrasi LST (CDSB dan SASB 2019). pesanan Jepang bisa meningkat operasi keuangan keberlanjutan di jangka panjang _ panjang, celah di peraturan membutuhkan mengatasi. Di samping itu, Jepang membutuhkan meningkat sumber kekuatan di lapangan penelitian, pendidikan dan pelatihan
----	----------------------------------	---	---	---	---	--

			skenario iklim.		dikembangkan di tempat lainnya, oleh pesaing UE dan Asia. Jepang membutuhkan memprioritaskan zat dibandingkan reputasi di upaya kebijakan dan mulai berlaku kerangka peraturan wajib yang telah terbukti Menjadi katalis paling efisien dan efektif untuk meningkatkan investasi keuangan keberlanjutan dan integrasi LST (Osaki 2019). Meskipun berbagai prakarsa positif oleh pemerintah dan badan perwakilan, analisis menunjukkan kebutuhan dekarbonisasi lagi lanjut dari ekonomi Jepang dan mitigasi tingkat besar dari paparan mempertaruhkan terkait iklim yang substansial. _	profesional, dengan ESG yang terampil dan profesional keuangan sebagian berkelanjutan besar tetap berasal dari posisi CSR sebelumnya, yang bukan cukup untuk menangani ' prinsip prinsip LST di tingkat perusahaan oleh memadai, navigasikan kompleksitas penggunaan data keberlanjutan di portofolio, dan gabungkan analisis keuangan tradisional dengan Faktor LST '(Edelmans dan Ioannou 2019).
4.	Mengatasi Keterkaitan yang Hilang dalam Keuangan Berkelanjutan: 'Taksonomi Keuangan SDG'	Christoph Nedopil Wang, Mathias Lund Larsen dan Y. Wang/2020 / <a href="https://www.tandfonli">https://www.tandfonli</a>	Taksonomi Keuangan SDG	Melakukan riset ke organisasi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), organisasi untuk Melakukan mengubah dan menghubungkan negara ke pengetahuan,	Untuk proyek yang akan masuk di Taksonomi, mereka harus meluruskan dengan 1. strategi dan kebijakan perkembangan nasional, 2. praktek terbaik internasional untuk perkembangan sosial , dan 3. menyediakan keuntungan	Pelajaran akan dipetik karena pemegang minat akan berlaku taksonomi di latihan, berikan memasukkan ke di konsultasi berkelanjutan untuk sempurnakan, perbarui, dan

		ne.com/doi/abs/10.1080/20430795.2020.1796101		<p>pengalaman, dan sumber daya kekuasaan untuk Tolong Publik membangun lebih hidup baik.</p>	<p>sektor sosial terkait dengan SDGs untuk 4. kelompok target SDG. Mendekati tiga melangkah memiliki terapan untuk mengecualikan proyek potensial berbahaya untuk SDG: Pengecualian proyek yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah nasional dan organisasi organisasi internasional, seperti badan-badan PBB dan bank pembangunan multilateral, memiliki pengecualian dari penggalangan dana proyek atau pembiayaan pengembangan. Sektor yang dikecualikan ini termasuk perjudian, senjata,hiburan dewasa, tembakau, dan proyek yang melanggarBaik dasar manusia, dll. Dan SDGs ada 6 kategori yaitu Infrastruktur Dasar (transportasi, air, energi, ruang terbuka hijau, dll), Perumahan Terjangkau (perumahan hijau dan hemat energi, daur ulang material perumahan, perumahan untuk kelompok berpenghasilan rendah, dll ), kesehatan (perawatan medis dan sanitasi).</p>	<p>sesuaikan spesifikasi teknis . Selanjutnya, UNDPdengan mitra lokal tujuan untuk menyesuaikan Taksonomi ke lagi beberapa pasar (mis karena Taksonomi momen ini fokus pada tujuan aturan perkembangan sosial Cina) Proses ini yakin akan mengarah ke pembaruan Taksonomi masa depan .</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Layanan, layanan logistik kesehatan, tata kelola dan layanan kesehatan masyarakat, dll.), Pendidikan, Teknologi dan Budaya (olahraga), Ketahanan Pangan (produksi pertanian, produk pertanian dan pengolahan makanan, pendidikan pertanian dan pengembangan keterampilan, dll ), Layanan Keuangan (layanan keuangan tabungan dan giro, layanan keuangan kredit, layanan asuransi, dll). Dan gabungkan semua 17 tujuan perkembangan berkelanjutan (SDGs).</p>	
5.	<p>Mengatur Keuangan Berkelanjutan: Wawasan Dari Indonesia</p>	<p>Abidah B. Setyowati /2020/ <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2020.1858741?journalCode=tcpo20">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2020.1858741?journalCode=tcpo20</a></p>	<p>Kontribusi artikel ini adalah untuk memeriksa kemajuan di melaksanakan peta jalan; untuk mengeksplorasi tantangan pemerintahan kendala utama pelaksanaannya yang</p>	<p>Wawancara dengan total 33 orang, termasuk 7 pejabat pemerintah, 17 perwakilan perbankan / lembaga keuangan, 4 LSM/ lembaga penelitian, dan 5 organisasi internasional / multilateral. Pertanyaan Wawancara terdiri atas dari masalah</p>	<p>Di Arsitektur peta Jalan keuangan berkelanjutan momen ini, pengatur layanan keuangan, OJK, bermain peran pemerintahan utama di mengembangkan kerangka regulasi dan pengawasan implementasinya. Studi ini menemukan tingkat ketaatan prosedur signifikan oleh institusi keuangan dengan mengembangkan rencana tindakan berkelanjutan dan</p>	<p>Bank Indonesia bisa belajar dari Bank of England di metode kerja sama dengan pemegang minat untuk mengembangkan dan meningkatkan alat analisis 14 skenario, percobaan dengan pendekatan yang berbeda untuk ketahanan ke 14 skenario dan hasil iklim yang berbeda,</p>

			<p>efektif; dan terakhir, untuk mengeksplorasi jalur potensial mengizinkan lembaga keuangan Indonesia untuk mempercepat transisi pergi ke ekonomi yang kuat dan berkelanjutan .</p>	<p>tema yang relevan terkait dengan pengalaman dan keterlibatan mereka di peta Jalan keuangan Indonesiayang berkelanjutan .</p>	<p>memberikan laporan kontinuitas tahunan. Namun, ada banyak tantangan peraturan yang menghambat implementasinya yang efektif. secara khusus, peraturan yang ada memiliki gagal memberi indikator yang jelas untuk ukuran ketaatan substantif dan tidak mengenali mekanisme insentif / disinsentif utama untuk arus utama keuangan berkelanjutan. Di samping itu, disana tingkat variabilitas tinggi di antaralembaga keuangan di metode mereka menafsirkan apa itu proyek hijau. Menggeser prioritas aturan baru-baru ini dari implementasi roadmap dapat lebih menghalangi pencapaian agenda keuangan Indonesia yang berkelanjutan. Kelemahan penerapan substantif dari implementasi peta jalan keuangan berkelanjutan juga harus dipahami di konteks situasi ekonomi lebih banyak politik Indonesia lebar . oleh</p>	<p>lembaga keuangan untuk meningkat alat dan metodologi mereka, dan tingkatkan kapasitas investor untuk membuat keputusan berdasarkan informasi melalui penyingkapan informasi (Gunningham, 2021).</p>
--	--	--	---	---	---	--

					<p>khusus, ada ketegangan yang serius dan berkelanjutan. Di antara ambisi negara untuk oleh cepat mengurangi emisi karbon dan kebutuhan perkembangan ekonomi yang dirasakan. Dalam menyelesaikan ketegangan ini, yang terakhir bagian besar kalahkan yang pertama, jadi ini sangat menantang untuk berlaku peta Jalan oleh efektif. hal ini khususnya terlihat dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung perkembangan tinggi karbon, generator listrik pembangkit listrik tenaga batu bara dan perkebunan kelapa telapak tangan. Sebagai contoh, satu studi baru-baru ini ini menunjukkan itu meskipun pemerintah memiliki berlaku aturan nol deforestasi dilarang ekspansi perkebunan kelapakelapa sawit di kawasan hutan, sebenarnya ekspansi itu Terus berlanjut berlanjut, terutama di daerah dengan menutupi tanah yang signifikan, Kalimantan dan Papua. Di</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>samping itu, tidak ada komitmen yang jelas dari lembaga keuangan untuk mengalihkan dari investasi bahan membakar fosil. Situasi ini bisa terhubung dengan, antara lain, tata kelola patologi lebih banyak energi luas di Indonesia dimana pemandangannya peraturanyang kompleks dan berbagai kebijakan yang tidak selaras memiliki menghalangi investasi di energi terbarukan. Peta Jalan Indonesia berkelanjutan bisa dibuat layak di Titik panjang tetap diragukan.</p>	
6.	Keuangan Berkelanjutan di Gemarny: Pemetaan Wacana, Pemangku Kepentingan, dan Inisiatif Kebijakan	Berthold M. Kuhn/2020 / <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20430795.2020.1783151?journalCode=tsfi20">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20430795.2020.1783151?journalCode=tsfi20</a>	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) menjadi referensi cangkang untuk keuangan berkelanjutan.	Wawancara semi terstruktur dilakukan oleh menatap maju berdasarkan kuesioner dan lainnya dia melanjutkan melalui dialog. Studi kasus Terpilih berdasarkan relevansi, aksesibilitas dan ketersediaan bank dan manajer aset	Banyak inisiatif berbeda dari Tipe pemegang kepentingan, termasuk organisasi Publik sipil yangmelakukannya promosi utama _ keuangan keberlanjutan di Jerman. Seperti negara lain, perhatian lebih besar untukkonsep tumbuh signifikan atas inisiatif berkelanjutan di tingkat global dan tingkat Uni Eropa (UE) serta minat dan komitmen yang meningkat dari sektor pribadi di mendefinisikan	Lagi meningkat prakarsa keberlanjutan di tingkat global dan UE serta meningkatminat dan komitmen sektor pribadi di mendefinisikan atau mengejar kecenderungan baru dipromosikan oleh seri prakarsa dari lebih rendah ke atas.

				<p>untuk wawancara.</p> <p>Aliran tiga bank main 'di Jerman-DZ Privatbank, Weberbank dan Landesbank Berlin dan satu Pengelola aset yang beroperasi di Jerman, Riedweg &amp;Hrovat yang berbasis di Basel, setuju untuk dibagikan informasi tentang Jalan mereka pergi ke lebih banyak keterlibatan kuat dengan keuangan berkelanjutan.</p>	<p>atau mengejar kecenderungan baru dipromosikan oleh seri prakarsa dari lebih rendahke atas.</p>	
7.	<p>Dinamika Spasial dan Penentu Keuangan Berkelanjutan: Bukti dari Investasi Modal Ventura di Tiongkok</p>	<p>Cheng Cheng , Yue Hua, and Duoduo Tan/2019/ <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S05261931902X">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S05261931902X</a></p>	<p>Government Guidance Fund (GGF), Exit Opportunity: Initial Public Offering (IPO), kekayaan awal, modal manusia, dan infrastruktur</p>	<p>Studi ini menggunakan kumpulan data panel unik dari aktivitas VC di 282kota tingkat prefektur di Titik 2004-2015 waktu. Data untuk tiga variabel hasil yangdisebutkan di atas dan diambil data Dana Bimbingan Pemerintah dari database Zero2IPO Group ( Qingke</p>	<p>Oleh empiris menunjukkan itu Investasi VC tergantungoleh ketidakseimbangan spasial yang diwakili oleh ketidakseimbangan regionaldi wilayah perkotaan Cina. Lanjut Temukan intervensi pemerintah, inovasi , peluang keluar , tingkat modal manusia dan infrastruktur angkutan menjadi lima faktor yang berpengaruh di pembentukan dan pengembangan kegiatan VC. Analisis spasial lagi</p>	<p>Studi ini menyarankan cek lagi detail tentang Efek VC dari mode GGF yang berbeda, termasuk investasi (langsung) dalam memulai, investasi (tidak langsung) dalam dana VC pribadi, dan mempercayakan dana kepada perusahaan VC. Terakhir, berdasarkan</p>

				Group), salah satu database China yang paling komprehensif di pasar VC/PE. Data paten diperoleh dari Pencarian dan Sistem Paten Analisis (PSAS) dioperasikan oleh Wealth Office Chinese State Intellectuals (SIPO).	lanjut membuka itu Kegiatan VC tidak hanya oleh lokasi berkorelasi otomatis, tetapi juga menerima dampak spasial positif dan negatif dari variasi variabel ekonomi tetangga.	ketersediaan data , studi masa depan sangat dianjurkan untuk menyelidiki pola lokasi dan faktor penentu aktivitas "VC berkelanjutan" atau "VC hijau" yang sebenarnya di Cina, sebagai lebih banyak ukuran langsung untuk ide keuangan berkelanjutan.
8.	Memperkuat Keuangan dalam Penelitian Transisi Keberlanjutan	Bjarne Steffen dan Tobias S. Schmidt/2021/ <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422421000927">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422421000927</a>	Sistem Inovasi Teknologi (TIS) dan Multi Level Perspective (MLP)	Melakukan penilaian dari teori, selanjutnya belajar diadakan dengan mengutip dari belajar masa lalu dan gunakan sistem di Melakukan lebih banyak konseptualisasi modal finansial bagus	Sejumlah artikel menganalisa koneksi Di antara krisis 2008–2009 dan keuangan transisi keberlanjutan. Mereka menggarisbawahi potensi krisis keuangan dan kebijakan tanggapan krisis ambisius untuk pemicu transisi besar sistem ekonomi global (Geels, 2013; Perez, 2013). baru-baru ini ini dua tinjauan pelingkupan fokus pada transisi sistem keuangan Suka itu (Hafner et al., 2020; Naidoo, 2019). Mereka menyorot jumlah besar tantangan kontinuitas sistem keuangan dan implikasinya. Namun,	Belajar lagi lanjut yg dibutuhkan untuk memanfaatkan potensinya, terutama di tengah Di antara studi kasus spesial tantangan pembiayaan individu dan analisis besar dari sistem keuangan oleh keseluruhan. Meningkatkan perwakilan keuangan juga bisa menjembatani belajar transisi kontinuitas dengan beasiswa

					mengingat tingkat abstraksi tinggi, kedua studi menahan diri sendiri untuk Tidak berlaku kerangka transisi khususnya pada hambatan, aktor, dan infrastruktur keuangan spesifik yang diidentifikasi.	berkembang cepat tentang keuangan berkelanjutan, tunjukkan melacak bagaimana menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan oleh sistem keuangan untuk transisi sosio-teknis, dan menggunakan potensi percepatan untuk langsung pengembalian modal finansial.
9.	Sistem Keuangan Berkelanjutan Menuju Keberlanjutan dalam Keuangan. Pendekatan Kelembagaan dan Manajerial	Magdalena Ziolo, Iwona Bak, Katarzyna Cheba, Anna Spoz, and Piotr Niedzielski /2021/ <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921019396">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921019396</a>	Mendekati kelembagaan dan manajerial	Menggunakan kuesioner yang bertujuan untuk evaluasi persepsi dari Pengelola ke pentingnya sistem keuangan berkelanjutan dalam manajemen lembaga keuangan yang terdiri dari 6 pertanyaan. dan gunakan Metode TOPSIS, ini adalah teknik komputasi termasuk di kelompok metode referensi, mana ada dua titik referensi	Sistem keuangan berkelanjutan adalah elemen penting di dorongan implementasi pada konsep perkembangan berkelanjutan. Kemajuan dalam penerapan sistem keuangan berkelanjutan tergantung pembuatnya keputusan pengelolaan keuangan dan pengetahuan mereka dan kesadaran finansial berkelanjutan, dansikap mereka ke risiko LST. Faktor pemicu dinamika perubahan dan implementasi konsep keuangan berkelanjutan di perbankan kuat di Risiko LST, terutama	Di penelitian masa depan, studi dalam tentang tingkat kemajuan di memikirkan tentang sistem keuangan berkelanjutan pada awalnya berencana untuk bank; baru ke panggung Berikutnya lempagapasar modal akan dipertimbangkan.

				<p>untuk obyek di kamar multidimensi, yaitupola dan anti pola .</p>	<p>mempertaruhkan iklim, yang menjelaskan posisi di peringkat, dan dapatkan bursa efek dan institusi tersebut terkait Tidak juga terkena Risiko LST seperti bank. Diasumsikan dan diimplementasikan di institusi yang mewakili model sistem keuangan Bahasa Jerman-Jepang dan Anglo-Saxon akan merata Ketika aturan tentang pengelolaan Risiko LST diperkenalkan .</p>	
10	<p>Philanthropic-Crowdfunding-Partnership: Bukti Studi Konsep untuk Pembiayaan Berkelanjutan dalam Transisi Energi Rendah Karbon</p>	<p>Ibrahim Ari dan Muammer Koc/2021/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221001742#!</p>	<p>Model Kemitraan Filantropi-Crowdfunding</p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif dengan menggabungkan model Philanthropic-Crowdfunding-Partnership (PCP)</p>	<p>makalah ini mengusulkan model pembiayaan berkelanjutan program khusus yang disebut philanthropic-crowdfunding-partnership (PCP) melalui studi kasus nyata untuk membangun medan listrik surya. Dengan memprioritaskan mobilisasi dan peningkatan modal dalam negeri kapasitas keuangan Di antara individu, bisnis usaha kecil dan menengah, dan sektor ketiga (yaitu, institusi filantropi). Dan pertimbangkan peningkatan kesejahteraan sosial dengan evaluasi mengubah ketidaksamaan kekayaan</p>	<p>Penelitian masa depan akan melibatkan perpajakan pendapatan dan kekayaan dengan skala tetap dan progresif dan ganti insentif harga dengan mendukung pembiayaan berdasarkan ekuitas dengan pengaturan pajak. Kemudian penelitian masa depan akan mempertimbangkan potensi mempertaruhkan pembiayaan berdasarkan ekuitas</p>

					<p>dan perlindungan lingkungan untuk periode waktu yang lama. Seperti dalam kasus pertanian Tenaga surya Turki dengan model ekonomi dan pembiayaan inovatif sederhana namun kuat ini (yaitu, PCP) memiliki potensi besar untuk membuka cakrawala baru Tidak hanya untuk Lembaga PPP Turki tetapi juga sistem ekonomi dunia, bersama-sama dengan perkembangan berkelanjutan dengan mengizinkan interaksi dan partisipasi warga negara. Hasil penelitian menunjukkan itu pembiayaan berdasarkan ekuitas tanpa aplikasi aturan memiliki lebih berpengaruh parah dan negatif pada ketidaksetaraan kekayaan dibandingkan pembiayaan berbasis hutang di Pengaturan ini, terlepas dari total kekayaannya meningkat. Dan platform pembiayaan Berikutnya adalah penggalangan dana berbasis ekuitas yang dimiliki oleh EBIN. Hasil</p>	<p>dengan mengecualikan persetujuan pembelian kekuatan. Dan model masa depan harus mengizinkan populasi ini untuk transisi kelas dari individu ke perusahaan besar dan sebaliknya untuk lebih banyak simulasi realistis. Penelitian masa depan juga harus membutuhkan kuantitas dan variasi Tipe perantara keuangan yang cukup untuk membawa kompetisi keuangan ke dalam model.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>menunjukkan itu skenario ini</p> <p>Tidak membawa ketidaksamaan kekayaan di jangkauan keadilan sosial yang bisa diterima, meskipun sedikit mengurangi ketidaksamaan di titik pendek. hal ini karena EBIN belum swasembada pada periode ini dan seterusnya mengumpulkan kekurangan dana dari individu sampai Menjadi swasembada. Setelah bahwa, EBIN menjadi satu satunya entitas pembiayaan pertanian kekuasaan Matahari kursus, dan perilaku ini membahayakan pengaturan sosial .</p>	
11	Praktik Pembiayaan Berkelanjutan Melalui Obligasi Hijau: Apa yang Mempengaruhi Besaran Pendanaan?	Suborna Barua dan Micol Chiesa/2019/ <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.2307">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.2307</a>	Pertama , jelajahi alam dari pengaruh berbagai faktor ukuran _ pembiayaan melalui menjalin kedekatan hijau diterbitkan oleh sejumlah _ besar penerbit . Kedua,	Berdasarkan studi spesial menjalin kedekatan hijau terbatas, sastra keuangan perusahaan tradisional , dan ketersediaan data, kami kembangkan seri variabel potensi terklasifikasi di tiga kategori utama: (a) karakteristik obligasi; (b)	Karakteristik spesial penerbit, pertumbuhan pendapatan (efek negatif) dan profitabilitas (efek positif) relatif lebih gigih sepanjang estimasi . Pada variabel pasar dan ekonomiditemukan ukuran masalah di pasar negara berkembang cenderung lagi besar. Namun, penerbitan dengan orientasi pasar internasional cenderung memiliki ukuran lebih banyak penerbitan rendah . Di samping itu itu,	Upaya kebijakan masa depan harus menargetkan “pembiayaan per penerbit” dengan dorongan setiap masalah potensi untuk dibiayai lagi banyak. hal ini bisa diadakan dengan dorongan perusahaan untuk mengganti lagi banyak pembiayaan layanan tradisional

			<p>dengan pertumbuhan pasar obligasi hijau mengejutka dari waktu ke waktu, dinamika berubah dengan cepat. Ketiga, obligasi peringkat beda pangkat memiliki performa berbeda, servis klien yang berbeda, dan diperlakukan oleh berbeda di pasar karena perbedaan yang signifikan di Profil risiko kembali. Terakhir, pertumbuhan penerbitan menjalin kedekatan hijau agregat Selama</p>	<p>karakteristik penerbit; dan (c) karakteristik ekonomi dan pasar. Gunakan regresi penampang OLS dan analisis dekomposisi Blinder-Oaxaca pada kumpulan data global yang bersumber dari Bloomberg pada 771 publikasi menjalin kedekatanberlabel diterbitkanhijau _ dari 2010 hingga 2017 untuk semua variabel pada tanggal penerbitan setiap menjalin kedekatan</p>	<p>pangkat lebih banyak penerbit tinggi kemungkinan akan lebih rendah ukuran penerbitan menjalin kedekatan kualitas tinggi dan sedang . Seluruh peringkat peringkat, ukuran rata-rata penerbitan menjalin kedekatan kelas tinggi oleh penting lagi rendah dibandingkan menjalin kedekatan kelas sedang dan tidak oleh penting lagi tinggi dari menjalin kedekatan non-investasi dan peringkat non-peringkat lainnya. Ini cara itu menjalin kedekatan kualitas pertambahan tinggi rata-rata lebih banyak pembiayaan per edisi rendah dibandingkan dengan yang lain. Upaya global untuk meningkat skala pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Pertama, kesehatan lebih banyak keuangan baik (misalnya, profitabilitas ) dan kualitas lebih aman tinggi (misalnya, peringkat). Kedua, pembuat kebijakan yang relevan harus tujuan untuk lagi melibatkan pasar negara berkembang untuk</p>	<p>yang ada (misalnya, pinjaman bank dan ekuitas swasta).</p>
--	--	--	--	---	--	---



			<p>sejumlah tahun terakhir tidak sebaik langsung memastikan itu ukuran pembiayaan perpenerbitan memiliki meningkat oleh signifikan.</p>		<p>meningkat ukuran pembiayaan. Ketiga, meskipun menjalin kedekatan sudah dalam mata uang EURO terlihat populer, harus ada lagi banyak upaya untuk meningkatkan jumlah penerbitan di lebih banyak denominasi USD dan CNY besar. Keempat, meskipun pasar obligasi hijau agregat mengembangkan cepat, penerbitan rata-rata per masalah tidak.</p>	
12	<p>Menuju Model Pembiayaan Berkelanjutan: Bukti Konsep Model Pembiayaan Alternatif Berbasis Wakaf untuk Investasi Energi Terbarukan</p>	<p>Ibrahim Ari dan Muammer KOC /2021/ <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845021000296">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845021000296</a></p>	<p>Studi ini berkontribusi pada sastra dengan (i) mengusulkan model konseptual, bersama-sama dengan perantara keuangan baru, yang mengurangi ketidaksamaan kekayaan dan beban hutang, (ii) merancang dan mensimulasikan model</p>	<p>Mendemonstrasikan model konseptual yang diusulkan untuk WOFI. model ini mengumpulkan dana untuk proyek solar-farm (SF) dengan menggunakan pembiayaan berbasis hutang dan ekuitas untuk membandingkan kinerja.</p>	<p>Studi ini memanfaatkan pemodelan berdasarkan agen dan simulasi komputer berdasarkan skenario di pembiayaan generator listrik kekuasaan Matahari untuk memberi bukti kuantitatif keuntungan dari merancang ulang sektor ketiga atau filantropi (dalam belajar ini, khususnya sistem wakaf). Belajar ini evaluasi berbagai kebijakan yang diusulkan di sistem ekonomi semi-tertutup dan bandingkan temuan dengan sistem pembiayaan konvensional. Implikasi aturan adalah bahwa model konseptual yang diusulkan</p>	<p>Studi ini mengabaikan mempertaruhkan 25 pembiayaan berdasarkan ekuitas karena adanya menjamin pemerintah dengan PPA. Di kehidupan nyata, pembiayaan berdasarkan ekuitas biasanya menampung risiko. Penelitian masa depan akan mengganti insentif dan subsidi pemerintah untuk pembiayaan berdasarkan ekuitas dengan</p>

			<p>berbasis agen di Pengaturan sosial-ekonomi . untuk menyelidiki oleh kuantitatif metode kerja, (iii) hitung ketidaksamaan kekayaan dengan metode baru untuk masa depan, bukan masa lalu, dengan menggabungkan setiap segmen masyarakat , seperti individu, perusahaan, dan institusi keuangan.</p>		<p>meningkat kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui distribusi lebih banyak kekayaan adil. Selanjutnya, usulan WOFI mengizinkan meningkatkan modal dengan menjaga jumlah keuntungan yang diinginkan di kolam renangwakaf untuk membangun mega proyek. Singkatnya, penelitian ini membuktikan itu lembaga berdasarkan wakaf memiliki potensi di luar normal untuk berkontribusi pada tujuan perkembangan berkelanjutan dengan memperhitungkan implikasisosial Titik panjang , pertumbuhan ekonomi seimbang , dan proyek ramah lingkungan .</p>	<p>memanfaatkan pengaturan pajak dan lebih rendah biaya ekuitas. Untuk itu, penelitian lagi lanjut membutuhkan mengurangi, bahkan hapus, jika mungkin, masalah lembaga yang menyangkut, misalnya, kepercayaan pada pelaku keuangan, korupsi wakaf dan perantara keuangan, dan asimetri informasi antara WOFI dan berpesta lain.</p>
13	<p>Keuangan Berkelanjutan. Perspektif Realis Kritis</p>	<p>Thomas Lagoarde-Segot /2018/ <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0</a></p>	<p>Perspektif Realis Kritis</p>	<p>Artikel ini mencoba menjawab tantangan epistemologis tertentu disampaikan ke metode penyelidikan penggunaan</p>	<p>Itu kebangkitan keuangan berkelanjutan membutuhkan mengubah kualitatif dalam di praktek keuangan dasar tidak sesuai dengan kerangka positivis. Bertanya keuangan berkelanjutan lagi membutuhkan</p>	<p>Penelitian dan pekerjaan praktisi masa depan akan mencoba untuk mencakup program ilmiah ini.</p>

		275531917 306414		tradisional di keuangan dengan penampilan keuangan berkelanjutan .	mengambil melihat sistem buka dimana institusinya pria tertanam di konteks sosial organik. Singkatnya, kami mencoba untuk menggali daerah ketegangan epistemologis, ontologis dan metodologis yang memisahkan keuangan sosial dan investasi dari teori keuangan standar, dan menyediakan alternatif metodologis untuk penyertaan topik ini di agenda penelitian keuanganmodern. Itu mengembangkan pengetahuan di arah yang berbeda, bahkan _ berlawanan, tanpa harus mencari untuk tentukan mana yang lebih bermanfaat akan sangat meningkat memahami kita tentang dunia keuangan.	
14	Hambatan terhadap Keuangan Berkelanjut an dan Krisis Covid19	Rodrigo Zeidan /2020/ <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20430795.2020.1783152?journal">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20430795.2020.1783152?journal</a>	Kontribusi utama kami adalah evaluasi oleh kritis kendala utama untuk keuangan berkelanjutan untuk tumbuh.	Artikel ini menggunakan mengakses ke pendiri Wright Capital, a perusahaan pengelolaan kekayaan yang dikelola dengan US\$600 juta, untuk	Seseorang Tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa diukur. Meskipun Faktor ESG telah mengizinkan perusahaan untuk membuka informasi penting tentang sumber mempertaruhkan lingkungan dan sosial, ada keterbatasan	Ketika bandul pengatur mengayun lagi, kali ini untuk mengizinkan lagi banyak meminjamkan untuk perusahaan yang tertekan , regulator keuangan bisa memasuki

		alCode=tsfi 20	Model bisnis Wright Capital menggabungkan: fokus investasi _ dampak dan keuangan berkelanjutan.	mengeksplorasi dinamika keuangan berkelanjutan dan investasi dampak di tengah krisis covid19.	penggunaannya. Ada sedikit standardisasi di pengungkapan, dan tidak ada bukti besar itu memfilter portofolio FaktorESG mengungguli portofolio tradisional. Namun, bisnis Suka normal memiliki Menjadi tidak cukup berharga di tengah pandemi global, dan perusahaan tangguh harus Menjadi lagi berharga saat ekonomi global mulai pulih	aturan penyingkapan tentang hasil lingkungan dan sosial sebagai kondisi untuk mengakses ke kredi
15	Keuangan dan Investasi Berkelanjutan: Agenda Kajian dan Penelitian	Felipe Aria Foglianode Souza Cunha, Erick Meira, and Renato J. Orsato /2021/ <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2842">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2842</a>	Meskipun studi ini memiliki berkontribusi pada ekspansi <i>Keuangan dan Investasi Berkelanjutan</i> (SFI), sektor ini memiliki jangkauan jauh _ lagi luas dan melibatkan lagi banyak pemain luar perusahaan dan investor; ini membutuhkan ditangkap	Studi empiris tentang SFI memiliki terfokus pada analisis kuantitatif, terutama yang berdasarkan metodeeksperimental dan korelasional. studi kasus bisa memberipandangan dalam, seperti Pemain SFI atau mengidentifikasi strategi yang paling hemat biaya biaya di konteks kelembagaan tertentu. Mengenai yang terakhir,	Keuangan dan investasi keberlanjutan (SFI) adalah kunci untuk dorongan pembangunan global yang berkelanjutan. Mengenali empat kelompok utama pemain di bidang SFI, dibedakan berdasarkan peran yaitu: (i) penyedia , (ii) penerima, (iii) pendukung, dan (iv) penerima manfaat . Pemberi mewakili sampingPenawaran SFI, terdiri daridari mereka yang menyalurkan dan menengahi sumber kekuasaan keuangan dan investasi untuk mengizinkan proyek, solusi, dan inovasi	Melakukan pemetaan dan integrasi elemen utama bidang SFI dan identifikasi jalan yang paling relevan untuk menjadi dikejar oleh penelitian masa depan dan mengusulkan sejumlah pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tantangan ini: terapkan berbagai Tipe cakupan geografis; mengintegrasikan

			<p>oleh penelitian.</p>	<p>literatur SFI dapat mengambil keuntungan dari metode yang lebih longitudinal, mengingat bahwa SFI melibatkan masalah Titik panjang. Survei dan wawancara juga harus digunakan untuk mengenali kendala strategi kunci SFI untuk pemain yang berbeda. Terakhir, data, metrik, dan peringkat sosial dan lingkungan baru juga diproduksi, diuji dan dibandingkan untuk memastikan itu belajar itu menggunakan berbagai memasukkan pada suatu waktu dorongan evaluasi Hasil non-keuangan SFI. Mengenali empat kelompok utama pemain di bidang SFI: penyedia, penerima,</p>	<p>berkelanjutan. Ini adalah investor individu, investor institusi (misalnya, reksa dana, pensiun, lindung nilai, nilai, benih, dan dana modal ventura; dan organisasi berdasarkan skor Suka amal dan gereja), dan lembaga keuangan (misalnya, bank, perusahaan asuransi dan institusi keuangan mikro). Lembaga keuangan, pada gilirannya, memiliki jangkauan jauh lagi besar di sistem keuangan dibandingkan dengan investor institusi. Untuk terlibat di SFI, institusi keuangan harus menerapkan lebih banyak strategi besar melalui faktor keberlanjutan tertanam ke di kebijakan, proses, produk dan layanan mereka. Pertama, strateginya harus jernih tentang dampak yang sosial dan lingkungan mereka mempromosikan, misalnya kesetaraan gender (Bolouuta , 2013) atau mitigasi mengubah iklim (Geddes et al., 2018). Tujuan perkembangan berkelanjutan memberi</p>	<p>teori, disiplin sains, dan topik yang relevan dengan SFI; dan mengadopsi metode dan data yang inovatif.</p>
--	--	--	-------------------------	--	--	--

				pendukung, dan penerima manfaat.	pedoman penting untuk upaya ini. Kedua, strategi penyedia membutuhkan aset dan instrumen keuangan yang komprehensif dan memadai dengan kebutuhan penerima dan profil penyedia. Belajar tentang hasil keuangan perusahaan yang bergerak di SFI sudah sangat prihatin dengan mengeksplorasi asosiasi CFP dengan pertunjukan sosial atau kontinuitas perusahaan (CSP), yaitu proxy untuk CSR dan keluaran keberlanjutan perusahaan. Untuk mengukur CFP, sarjana memiliki menggunakan berbagai ukuran akuntansi dan berbasis pasar (Galant & Cadez, 2017), termasuk metrik yang melampaui indikator terkait saham, seperti modal utang (Chava, 2014; Goss & Roberts, 2011).	
16	Peran Zakat sebagai Keuangan Sosial Islami Menuju Pencapaian	Ummi Ibrahim Atah, Wafa Mohammed Ali Nasr, dan	Nigeria telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan dan mengkaji	Studi ini menemukan bahwa Zakat sebagai keuangan sosial Islam untuk memastikan keadilan sosial-ekonomi dan distributif melalui melestarikan dan	Penelitian lebih lanjut harus melakukan survei lapangan untuk mengukur persepsi para pemangku kepentingan

<p>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Nigeria Utara</p>	<p>Mustafa Omar Mohammed/2018/https://ircief.org.my/gcief2018/wp-content/uploads/2018/10/6.-The-Role-of-Zakat-as-An-Islamic-Social-Financial-Menuju-Pencapaian-Pembangunan Berkelanjutan-Tujuan-Studi-Kasus-Nigeria Utara.pdf</p>	<p>masalah kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan dan kekerasan. Namun kemajuannya sangat lambat. Ada kelangkaan literatur yang telah meneliti sejauh mana Zakat dapat berperan dalam melengkapi upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Nigeria Utara. Makalah ini mengisi celah ini.</p>	<p>literatur secara kritis.</p>	<p>mengedarkan kekayaan, memiliki potensi untuk mencapai tujuan pembangunan yang paling berkelanjutan. Ini termasuk pengurangan kemiskinan, kelaparan dan ketidaksetaraan. Selain itu, zakat dapat mempromosikan pertanian berkelanjutan, masyarakat yang damai dan inklusif, pendidikan berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa, untuk memastikan pemanfaatan dana zakat yang efektif oleh penerima dan cakupan Zakat yang lebih luas kepada sejumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut, pemanfaatan komunikasi modern berupa platform berbasis e-community untuk pencerahan menuju investasi dana zakat dalam bentuk mudharabah adalah wajib. Pendekatan ini juga berguna dalam meningkatkan inklusi keuangan orang miskin dan diversifikasi sumber pengumpulan zakat.</p>	<p>sehubungan dengan platform berbasis komunitas yang diusulkan dengan mengacu pada keadaan tertentu.</p>
--	---	---	---------------------------------	---	---

17	Menggali Potensi Zakat untuk Mendukung Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia	Sarah Asmalia , Rahmatina Awal Kasri, dan Abdillah Ahsan/2018/ <a href="https://ijazb.aznas.com/index.php/journal/article/view/106">https://ijazb.aznas.com/index.php/journal/article/view/106</a>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel TPB yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat umat Islam. Selain itu, sikap dipengaruhi oleh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap organisasi zakat .	Penelitian ini mengumpulkan data primer dari 304 responden yang tinggal di wilayah Jabodetabek di Indonesia dan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behaviors (TPB) untuk membina niat. Analisis data juga menggunakan statistik deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM).	Penelitian ini menemukan tiga variabel laten yang mempengaruhi sikap terhadap zakat, yaitu pengetahuan terhadap zakat, religiusitas, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwasikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat Muslim membayar zakat. Hal ini juga menyiratkan bahwa pengetahuan, religiusitas, dan kepercayaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap niat membayar zakat .	
18	Memanfaatkan Zakat untuk Mencapai	Raflu Ibrahim Adebayo/2020/	SDGs jika dimanfaatkan dengan benar, dipantau dan	Metode historis, deskriptif dan eksegetis diadopsi untuk tujuan ini.	Zakat menunjukkan bahwa Islam tidak terbatas hanya pada ketaatan pada doa-doa harian dan ritual lainnya.	



	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Nigeria	<a href="https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/233">https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/233</a>	dimanfaatkan untuk tujuan yang dimaksudkan.		Ini memiliki makna sosial dan ekonomi yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang di masyarakat. Harus disebutkan bahwa agama harus menjadi pertimbangan setiap kali kebijakan dibuat baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan Pembangunan Milenium tidak dapat mencapai banyak hal di Nigeria karena agama diremehkan dan tidak diizinkan untuk ditampilkan dalam proyek tersebut.	
19	Zakat dan SDG 6: Studi Kasus Baznas, Indonesia	Fahmi Ali Hudaefi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Hidayaneu Farchatunnisa, dan Ulfah Latifah Juni /2020/ <a href="https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1144">https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1144</a>	Zakat dan SDG 6	Studi kasus proyek BAZNAS di Kendal, Boyolali, Indonesia ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan observasi partisipatif dan wawancara semi terstruktur.	Temuan tersebut menjelaskan pandangan masyarakat setempat setelah menerima bantuan, termasuk identifikasi penurunan jumlah masyarakat yang terkena diare. Informasi ini dapat memvalidasi hubungan antara kesehatan, air dan sanitasi. Lebih lanjut, temuan tersebut menangkap keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek. Dengan demikian, implikasi sosial dan praktis	Pekerjaan di masa depan dapat berkolaborasi dengan peneliti ilmu kesehatan dan mengumpulkan lebih banyak bukti dari lembaga zakat lain untuk mempelajari apakah distribusi zakat untuk fasilitas air dan sanitasi memecahkan masalah terkait kesehatan di

					<p>diungkapkan oleh penelitian ini. Studi ini memelopori pembentukan bukti ilmiah tentang program pembangunan toilet individu yang dilaksanakan oleh BAZNAS, dan tentang perspektif penerimanya setelah menerima bantuan.</p>	<p>masing-masing bidang yang terlibat. Selain itu, pekerjaan di masa depan dapat menggunakan metode seperti Delphi, pemrosesan jaringan analitik (ANP) dan pemodelan persamaan struktural (SEM) untuk membangun bukti yang lebih kuat.</p>
20	<p>Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pendanaan Zakat Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia</p>	<p>Syamsuri , Yaumi Sa'adah , Ismail aulia Roslan /2022/ <a href="https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie">https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie</a></p>	<p>Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas</p>	<p>Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari buku, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lain yang memiliki relevansi</p>	<p>Persamaannya cukup jelas antara SDGs dan zakat. Banyak hal yang tercantum dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam. SDGs adalah tentang mengurangi kemiskinan dan kelaparan dan mengurangi ketidaksetaraan dengan berbagi kekayaan. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam. Dalam keyakinan Islam, ada lima tujuan mendasar yang juga dikenal sebagai Maqashid al Syariah. Tujuan-tujuan ini meliputi: perlindungan iman, kehidupan,</p>	

				dengan masalah yang akan dibahas.	keturunan, akal dan kekayaan. Pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan penyalurannya dalam bentuk pembentukan kebijakan dan regulasi yang tepat yang dapat dilaksanakan oleh semua penanggung jawab pengelolaan zakat agar sejalan dengan tujuan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

### 3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui *Tandfonline*, *ScienceDirect*, *Onlinelibrary.Wiley*, *ResearchGate*, dan, *Google Scholar* dengan metode studi dokumen yang meliputi studi literatur dari penelitian sebelumnya dengan periode waktu 2018 – 2021 dan mengutip isi website lembaga zakat Indonesia. Dan kemudian, data yang diperoleh akurat. Melakukan penelitian untuk mengetahui bahwa penyaluran zakat memiliki manfaat bagi keuangan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi Implementasi & Peran SDGs di Indonesia dan Zakat dalam Kesejahteraan Ekonomi Melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### 4. Hasil dan Diskusi

Zakat dapat dikatakan relevan dengan hampir semua tujuan SDGs yang ingin dicapai. Tujuan pertama yaitu memerangi kemiskinan, hal ini dapat dicapai dengan menerima zakat yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Memberi kepada fakir miskin untuk memerangi

kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan doa-doa yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini menggarisbawahi posisinya yang unik dalam membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat dalam Islam. Selain itu, sebagian besar penerima zakat adalah fakir miskin (al- fuqarau) dan fakir miskin (al- Masakin). Dengan begitu, zakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dalam hal mencari orang yang berhak menerima zakat, mencatat, menilai dan memungut iuran, serta bagi hasil (Qardhawi , 1999).

Ciri lain dari zakat adalah tidak dipungut atas pendapatan pembayar, tetapi pada akumulasi kekayaan bersih yang dimiliki selama satu tahun (Adebayo, 2011). Artinya pemberi tidak perlu dibebani untuk mempengaruhi kekayaannya. Dan juga dapat mendorong investasi agar kekayaan tidak dibiarkan menganggur yang dapat menyebabkan kekayaan menjadi dana yang menganggur. Dengan demikian, hal itu dapat menjadi dasar untuk menggeser pajak dari pendapatan pembayar ke akumulasi kekayaan dari pendapatan itu.

Tujuan kedua dalam pencapaian target SDGs adalah mengakhiri kelaparan, memenuhi ketahanan pangan, mencapai kesehatan gizi, dan mendorong & meningkatkan pertanian berkelanjutan, yang keduanya dalam lingkup zakat. Dalam Al-Qur'an Surah Al An'am : ayat 141 menginformasikan bahwa zakat dapat dikurangkan dari hasil pertanian. Dalam ayat yang berbunyi:

“Makanlah buahnya ketika sudah berbuah dan jangan lupa beri hak berupa zakat ketika menuai hasilnya, tetapi jangan berlebihan dalam arti tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros, tetapi dalam keduanya.”.

Tujuan ketiga dalam pencapaian target SDGs adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang dari segala usia yang ditampung di lembaga zakat. Hal ini karena zakat dapat menjamin kehidupan yang sehat antara si kaya dan si miskin. Kemudian, karena membantu redistribusi kekayaan di masyarakat sehingga kekayaan tidak didistribusikan ke tangan orang kaya saja. Hal ini juga dapat mempromosikan kehidupan yang sehat dan damai antara Muslim dan non-Muslim karena beberapa berpendapat bahwa non-Muslim juga dapat dimasukkan dalam daftar orang yang berhak menerima zakat. Dapat dilihat bahwa salah satu golongan penerima zakat adalah karena Allah SWT (Fi sabilillah). Ada perdebatan di antara para ahli hukum untuk memasukkan penggunaan zakat untuk semua jenis program dan proyek dengan cara yang benar dan dalam penyediaan program dan proyek kesejahteraan sosial serta pelatihan atau pendidikan pekerja di bidang ilmiah dan teknis yang bermanfaat secara langsung. orang miskin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk memberikan pelayanan sosial seperti rumah sakit dan sekolah bahkan untuk pabrik yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Shah, 2010). Dapat dikatakan bahwa tujuan empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, sebelas dan dua belas dari tujuan SDGs termasuk zakat.

Tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan, sama relevannya dalam ranah zakat. Hal ini karena zakat tidak membedakan gender. Seorang wanita dapat termasuk dalam salah satu kategori orang yang dapat menerima zakat. Disebutkan bahwa para janda merupakan penerima zakat yang utama. Ketentuan yang sama menunjukkan bahwa zakat tidak memiliki batas geografis, karena tangan filantropis zakat telah diperluas oleh beberapa negara kaya dengan populasi Muslim ke negara-negara berkembang lainnya di dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa zakat, sejalan dengan tujuan kesepuluh SDGs, dapat membantu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Kemudian adalah mungkin untuk mengingat fakta bahwa tidak pantas mengeluarkan zakat dari satu lokasi geografis ke lokasi geografis lainnya.

Tujuan tiga belas, empat belas, dan lima belas berkaitan dengan mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; dapat dilakukan dengan melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; dan dapat memelihara, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat & laut, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan. Tujuan tersebut dapat diambil dari pelajaran yang dapat diambil dari lembaga zakat. Dapat dicatat bahwa ajaran Islam menunjukkan kerendahan hati dalam lembaga zakat, yang menetapkan biaya moderat dalam jumlah yang harus dibayar sebagai zakat. Zakat juga meminimalkan tingkat tinggi di mana orang menjadi materialistis untuk tujuan ekonomi. Kecenderungan materialistis dalam dirinya membuatnya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa konservasi sehingga berkembang menjadi keserakahan dimana ia mendapatkan lebih dari yang ia butuhkan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tujuan keenam belas dan ketujuh belas bertujuan untuk mempromosikan dan mempromosikan inklusi sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, memberikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; serta memperkuat dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Zakat adalah sumbangan keagamaan yang dikumpulkan dalam rangka membina masyarakat yang damai dan inklusif. Baik si miskin maupun si kaya sama-sama puas dan dapat bekerja sama secara harmonis karena memiliki rasa simpati terhadap si miskin yang terbangun di hati si kaya, sedangkan si miskin juga menekan rasa sakit dan niat buruknya terhadap si kaya melalui hal-hal yang tidak perlu. kecemburuan dan tidak sehat, karena memiliki bagian dalam kekayaan orang kaya.

#### **4.1 Analisis Ruang Lingkup**

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan, yang sebagian besar objek penelitian dilakukan di negara Benua Asia. Penelitian yang meneliti tentang peran zakat sebagai keuangan sosial islami menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan: studi kasus Nigeria Utara

(Atah, Nasr, &, Mohammed, 2018). Potensi zakat untuk mendukung perwujudan sustainable development goals di Indonesia (Asmalia & Ahsan, 2018). Philanthropic-Crowdfunding Partnership: bukti studi konsep untuk pembiayaan berkelanjutan dalam transisi energi rendah karbon (Ari & Koc, 2021). Memanfaatkan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Nigeria (Adebayo, 2020)

Demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran zakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara Benua Amerika dan Benua Eropa.

**Tabel 2. Tempat yang Menjadi Objek Penelitian**

Instrumen	Total Penelitian
Indonesia	4
Nigeria	2
Qatar	2
Bangladesh	1
Jepang	1
German	1
Tiongkok	2
Swedia	1
Uni Eropa	1
Swiss	1
Polandia	1
Prancis	1
Brazil	2

**Tabel. 2** Menunjukkan penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan mayoritas penelitian ditemukan terdapat di Benua Asia. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa Benua seperti Eropa dan Amerika juga sudah banyak yang meneliti

## 5. Research Gap

Peneliti menemukan dua puluh jurnal yang relevan dengan tema yang diteliti. Tetapi dari dua puluh jurnal temuan, hanya terdapat tujuh jurnal yang memiliki hubungan dengan topik yang diangkat.

Bahwa di jurnal lainnya lebih banyak membahas seputar pengurangan karbon, taksonomi keuangan, dan obligasi hijau terdapat pada tahun 2020 & 2021. Sedangkan jurnal yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu mengenai zakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022.

## **6. Kesimpulan**

Kajian ini menjelaskan tentang peran zakat dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ketujuh belas tujuan keuangan pembangunan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam SDGs, dan zakat merupakan jembatan dalam mewujudkan ketujuh belas tujuan tersebut. Dengan membayar zakat, maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menafkahkan hartanya agar tidak menjadi pemborosan harta. Zakat juga merupakan salah satu cara untuk menjalankan aturan di jalan Allah SWT ( Fii Sabilillah ).

Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa uang zakat dapat membantu pelaksanaan SDG, khususnya dalam mengkonversi Mustahiq (penerima zakat, yaitu fakir atau yang berhak) menjadi Muzakki (seseorang yang membayar zakat). Akibatnya, hubungan antara zakat dan SDGs sangat erat untuk keduanya. Selain itu, dengan kapasitas zakat yang meningkat dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa literasi zakat telah menyebar ke seluruh umat Islam yang mau membayar zakat. Peran zakat pada 17 target pembangunan berkelanjutan memiliki pengaruh yang menguntungkan , menurut laporan tersebut. Dapat dikatakan bahwa peran zakat dalam mempromosikan kesejahteraan manusia terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **7. Rekomendasi Penelitian**

Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat melihat pengaruh zakat dengan menambahkan variabel dari berbagai aspek, menganalisis tingkat potensi zakat dengan menggunakan jangka waktu, dan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tujuan SDGs yang dapat dikaitkan dengan zakat. Kemudian melakukan penelitian terhadap daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) apakah zakat dan SDGs di wilayah tersebut sudah terlaksana secara optimal. Peneliti masa depan harus mempelajari lebih dalam pembangunan berkelanjutan dan mencari referensi tambahan tentang hubungan antara SDGs dan zakat untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, menghasilkan pekerjaan yang layak untuk semua orang, melestarikan sumber daya, dan sebagainya.

## **Referensi**

- Maltais, A., & Nykvist, B. (2020). Memahami Peran Green Bonds dalam Memajukan Keberlanjutan.
- Schutze, F., & Stede, J. (2021). Taksonomi Keuangan Berkelanjutan UE dan Kontribusinya terhadap Netralitas Iklim.
- Schumach, K., Chenet, H., & Volz, U. (2020). Keuangan Berkelanjutan di Jepang.

- Wang, CN, Larsen, ML, & Wang, Y. (2020). Mengatasi Keterkaitan yang Hilang dalam Keuangan Berkelanjutan: "Taksonomi Keuangan SDG'.
- Setyowati, AB (2020). Mengatur Keuangan Berkelanjutan: Wawasan Dari Indonesia.
- Kuhn, BM (2020). Keuangan Berkelanjutan di Jerman: Wacana Pemetaan, Pemangku Kepentingan, dan Inisiatif Kebijakan.
- Cheng, C., Hua, Y., & Tan, D. (2019). Dinamika Spasial dan Penentu Keuangan Berkelanjutan: Bukti dari Investasi Modal Ventura di Cina.
- Steffen, B., & Schmidt, TS (2021). Memperkuat Keuangan dalam Penelitian Transisi Keberlanjutan.
- Ziolo, M., Bak, I., Cheba, K., Spoz, A., & Niedzielski, P. (2021). Sistem Keuangan Berkelanjutan Menuju Keberlanjutan dalam Keuangan. Pendekatan Kelembagaan dan Managerial.
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Kemitraan Filantropi Crowdfunding: Studi Bukti Konsep untuk Pembiayaan Berkelanjutan dalam Transisi Energi Rendah Karbon.
- Barua, S., & Chiesa, M. (2019). Praktik Pembiayaan Berkelanjutan Melalui Obligasi Hijau: Apa yang Mempengaruhi Besaran Pendanaan?
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Menuju Model Pembiayaan Berkelanjutan: Bukti Konsep Model Pembiayaan Alternatif Berbasis Wakaf untuk Investasi Energi Terbarukan.
- Lagoarde-Segot, T. (2018). Keuangan Berkelanjutan. Perspektif Realis Kritis.
- Zeidan, R. (2020). Hambatan Keuangan Berkelanjutan dan Krisis Covid19.
- Cunha, FA, Meira, E., & Orsato, RJ (2021). Keuangan dan Investasi Berkelanjutan: Tinjauan dan Agenda Penelitian.
- Atah, UI, Ali, WM, & Mohammed, MO (2018). Peran Zakat sebagai Keuangan Sosial Islam Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Nigeria Utara.
- Asmalia, S., Kasri, RA, & Ahsan, A. (2018). Menggali Potensi Zakat untuk Mendukung Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
- Adebayo, RI (2020). Memanfaatkan Zakat untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Nigeria.
- Hudaefi, FA, Saoqi, AA, Farchatunnisa, H., & Junari, UL (2020). Zakat dan SDG 6: Studi Kasus BAZNAS, Indonesia.
- Syamsuri, Sa'adah, Y., & Roslan, IA (2022). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Pendanaan Zakat Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.